

## KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 berarti Kantor Kecamatan Panji telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun keempat dikaitkan dengan implementasi dan Rencana Strategis 2016 - 2021 yang memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Panji.

Selama tahun 2019 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis telah berhasil dicapai dan dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP ) Tahun 2019 Kantor Kecamatan Panji.

Hal tersebut memberikan tuntunan kepada semua OPD untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Dalam hal ini laporan akuntabilitas kinerja yang memiliki 2 fungsi utama yaitu:

**pertama** Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders ( BPKP, instansi pemerintah pusat/daerah dan masyarakat ).

**Kedua** Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut, laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2019.

Rencana Kinerja ( *Performance Plan* ) 2019 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2019 dengan sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2016 - 2021 Kantor Kecamatan Panji.

Sementara itu, capaian kinerja ( *Performance Results* ) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2019 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2019. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Kantor Kecamatan Panji kepada stakeholders.

Kemudian capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran akan dianalisis lebih lanjut bagi tujuan indentifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Disini informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Kantor Kecamatan Panji.

Akhir kata diharapkan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Panji.

Panji, 10 Januari 2020

**CAMAT PANJI**

**ANNA KUSUMA. SH. M.Si**

Pembina

NIP. 19831221 200604 2 009

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Panji menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 melaporkan capaian kinerja (Performance Results) selama tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2016-2021 Kantor Kecamatan Panji.

Sesuai Rencana Kerja Tahun 2019 selama periode ini Kantor Kecamatan Panji melaksanakan beberapa kegiatan dari program yang telah ditetapkan untuk memenuhi sasaran strategis.

Pada APBD Tahun Anggaran 2019 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Panji sebesar Rp. **5.215.257.297,00 ( Lima Milyard Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah )**. Dari plafon anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. **4.886.238.132,00 ( Empat Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah )** atau mencapai **93,69 %**.

Untuk Tahun 2019 capaian keberhasilan kinerja Kantor Kecamatan Panji sebanyak 2 ( dua ) sasaran dengan 3 ( tiga ) indikator kinerja ditambah dengan 1 ( satu ) indikator pada saat Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, yaitu Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah .

**Sasaran yang dicapai adalah sebagai berikut :**

- 1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan.**
- 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Bupati berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan SKPD selaku entitas akuntabilitas kinerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja SKPD.

### **1.2. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2019 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi kecamatan Kabupaten Situbondo;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 tahun 2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud :**

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **Tujuan :**

Tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai bahan akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan penyempurnaan dokumen Perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

### **1.4. Tugas Pokok dan Fungsi**

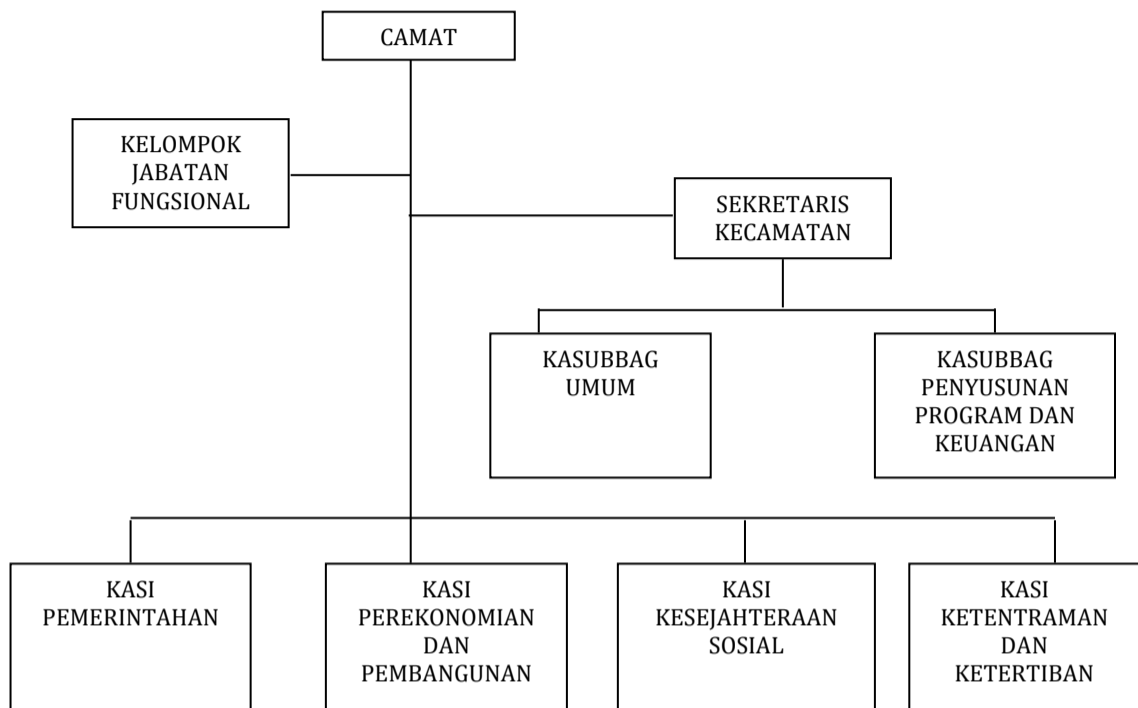
Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan Kantor Kecamatan Panji memiliki struktur berdasarkan PP 18 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan dengan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan membawahi :
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing – masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

## A. Struktur Organisasi :

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Panji dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :



Camat, Sekretariat Kecamatan yang membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan serta Seksi – seksi Kantor Kecamatan Panji mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda :

1. *Camat* mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kecamatan.
2. *Sekretariat Kecamatan* mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya
- b. Pengelolaan urusan keuangan
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta tata usaha perlengkapan
- d. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga
- e. Pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada camat
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing – masing Sub Bagian sebagaimana tersebut diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. *Sub Bagian Umum* mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Pencatatan dan pengarsipan surat menyurat
- b. Penyiapan dan pendistribusian surat keluar
- c. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga dan Protokoler
- d. Penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. *Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan* mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program serta anggaran dan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran
- b. Pengelolaan urusan keuangan
- c. Pembuatan laporan keuangan
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris kecamatan
- f. Penghimpunan dan Pengolahan bahan – bahan untuk menyusun usulan program kerja
- g. Penyiapan Rencana Kegiatan
- h. Penyiapan Rencana Kebutuhan Kantor
- i. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan
- j. Pelaporan Hasil pelaksanaan Tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan
- k. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. *Seksi Pemerintahan*, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan Umum dan pemerintahan Desa / Kelurahan serta Ketentraman dan Ketertiban. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan Koordinasi antar instansi di lingkungan kecamatan
- b. Pembinaan pemerintahan Desa / Kelurahan
- c. Pembinaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )
- d. Pelaksanaan tugas pembuatan monografi kecamatan
- e. Pelaksanaan kegiatan Ketatausahaan

- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya
6. *Seksi Perekonomian dan Pembangunan* mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengevaluasian terhadap kegiatan di bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan fisik. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi
  - b. Penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan
  - c. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program Bimas Linmas dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong.
  - d. Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi
  - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
  - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
  - g. Penyusunan program dan pembinaan saran dan prasarana
  - h. Pembinaan pelayanan umum
  - i. Pembinaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan
  - j. Penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan
  - k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
  - l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
  - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.
7. *Seksi Kesejahteraan Sosial* mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, pembinaan terhadap kegiatan di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan sosial dan pelayanan sosial
  - b. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, Keluarga Berencana, Gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular
  - c. Penyiapan bahan untuk penyusunan program Pembinaan, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
  - d. Penyiapan bahan Rekomendasi.



- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.
8. *Seksi Ketentraman dan Ketertiban* mempunyai tugas membantu camat untuk melaksanakan tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban.
  - b. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.
  - c. Penyelenggaraan administrasi dan oprasional kegiatan administrasi perlindungan masyarakat (LINMAS).
  - d. Pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban
  - e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban
  - f. Pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban
  - g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
  - h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat.
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.6. Kondisi Kepegawaian**

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 26 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping itu, juga dibutuhkan minimal 2 (dua) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pengaturan ketertiban dan ketentraman sekaligus pengamanan aset kantor dengan penggiliran shift jaga di luar jam dinas. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 23 Pegawai yang terdiri dari :

- a. Golongan IV : 2 orang
- b. Golongan III : 9 orang
- c. Golongan II : 12 orang
- d. Non PNS : 10 orang

Jumlah PNS Kecamatan Panji yang menduduki jabatan struktural adalah :

- a. Camat ( Eselon III / a ) : 1 orang
- b. Sekretaris Camat ( Eselon III/b ) : 1 orang
- c. Kepala Seksi ( Eselon IV/a ) : 3 orang
- d. Kepala Sub.Bagian ( Eselon IV/b ) : 1 orang

**Tabel 1.1**

**Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan diklat**

No	Jabatan	Gol	Eselon	Pendidikan	Diklat yang pernah diikuti			Jml
					Pim II	Pim III	Pim IV	
1.	Camat Panji	IV/a	III/a	S2	-	√	√	1
2.	Sekcam	IV/a	III/b	S1	-	√	√	1
3.	Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kasi Trantib	III/b	IV/a	SLTA	-	-	-	1
5.	Kasi Ekbang	III/c	IV/a	S1	-	-	√	1
6.	Kasi Kesra	III/c	IV/a	S1	-	-	-	1
7.	Kasubbag Keuangan	III/c	IV/b	S1	-	-	-	1
8.	Kasubbag Umum	-	-	-	-	-	-	-
9.	Staf	III/a	-	SLTA	-	-	-	2
10.	Staf	III/b	-	S1	-	-	-	3
11.	Staf	II/a	-	SLTA	-	-	-	1
12.	Staf	II/b	-	-	-	-	-	-
13.	Staf	II/c	-	SLTA	-	-	-	5
14.	Staf	II/d	-	SLTA	-	-	-	6
<b>Total</b>								<b>23</b>

## **1.6. Sistematika Penyajian**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5. Struktur Organisasi
- 1.6. Kondisi Kepegawaian
- 1.7. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis 2016-2021
  - 2.1.1 Visi
  - 2.1.2 Misi
  - 2.1.3 Tujuan dan Sasaran
- 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3. Perjanjian Kinerja 2019
- 2.4. Perencanaan Anggaran 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2. Analisis Capaian Kinerja
- 3.3. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- SK IKU Perangkat Daerah
- Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2019 yang telah ditandatangani
- Rencana Strategis (tabel 4.1; tabel 5.1)
- Pengukuran Kinerja Tahun 2019 (Laporan Perkembangan Kinerja Kepala OPD dan Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2019)

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis 2016 – 2021

##### 2.1.1 Visi

**“ Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan “**

##### 2.1.2 MISI :

1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan;
2. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal;
3. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan;
4. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Selanjutnya Kecamatan Panji untuk mewujudkan Visi diatas, dipandang perlu mempertajam dan mereformulasi program tahunan dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dari setiap Desa/Kelurahan untuk diwujudkan dalam kegiatan tahunan, untuk itu Kantor Kecamatan Panji mendukung Misi ke 5 yaitu : **Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan;**

##### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

###### **Tujuan :**

Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Panji yang baik.

###### **Sasaran :**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.2.1

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai survey Indeks Kepuasan masyarakat ( IKM ) kecamatan Panji	Persentase Nilai survey Indeks kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Panji	Dokumen IKM	Kasi Pemerintahan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase Jumlah Desa yang Pelaporan keuangan yang Tertib dan Baik	Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan dengan baik _____ x 100 % Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan Pelaporan	Laporan ADD Desa	Kasi Jumlah Kar Pemerintahan
		Jumlah desa yang melaksanakan administrasi dengan baik _____ x 100 % Jumlah keseluruhan desa	Laporan Desa	Kasi Pemerintahan
	Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	Jumlah usulan yang masuk RKPD _____ x 100 % Jumlah keseluruhan usulan musrenbang	Dokumen usulan musrenbang	Kasi Ekonomi dan Pembangunan

## 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan 2019

Tabel 2.3.1  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
KANTOR KECAMATAN PANJI

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai survey Indeks kepuasan Masyarakat ( IKM ) kecamatan Panji	A ( 90 )
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa dengan Pelaporan Keuangan yang tertib dan baik	100 %
	Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	100 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	82,30(A)

## 2.4 Perencanaan Anggaran 2019

**Tabel 2.4.1**  
**Rencana Anggaran Perubahan 2019**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Panji	Penyusunan Nilai survey IKM Kecamatan Panji	Rp. 3.500.000
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan Pelaporan keuangan yang tertib dan baik	Penunjang program ADD	Rp. 15.000.000
		Verifikasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Rp. 35.000.000
	Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk RKPD.	Pelaksanaan musrenbang kecamatan	Rp. 17.000.000

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Secara umum kantor Kecamatan Panji telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang di bebankan kepada kantor Kecamatan Panji baik terhadap kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis pada pengukuran kinerja pada kali ini memfokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact belum di ukur mengingat kedua indikator tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengukurnya.

**1.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 terdiri dari 4 indikator kinerja untuk mendukung 2 sasaran strategis. Capaian Kinerja (performance result) selama tahun 2019 yang semuanya mencapai target. Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1.1.1 Indikator Kinerja I : Nilai IKM Kecamatan Panji,**

yang operasionalnya didukung oleh kegiatan :

- Pengukuran IKM yang dilakukan dengan memberikan Kuisisioner IKM pada masyarakat pada waktu pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, dan didapatkan Nilai survey IKM Kecamatan Panji mencapai nilai A ( 91,03 ) yang berarti melebihi nilai yang ditargetkan yaitu dengan nilai A ( 90 ) atau 100 %.

Adapun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019		%
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Panji	100 % ( A/90 )	91,03 % ( A )	91,03 %

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Panji yang didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 91,03% (sangat berhasil) dengan penjelasan sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Panji**

Adalah menggambarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan dengan cara survey setiap 6 bulan dalam 1 tahun menunjukkan persentase sebesar 91,03 % dengan nilai A (91,03), sehingga capaian kerjanya sangat memenuhi target capaian sebesar 100 % dengan nilai A ( 90 )

**1.1.2 Indikator Kinerja II : Persentase Desa dengan Pelaporan Keuangan yang tertib dan baik**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019		%
		Target	Realisasi	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan yang tertib dan baik	100% (10 desa)	100% (10 desa)	100 %

Dari tabel tersebut dapat disampaikan bahwa Persentase jumlah desa yang pelaporan keuangan yang tertib dan baik dibandingkan dengan jumlah desa keseluruhan yang melaporkan keuangannya yang ada di wilayah Kecamatan Panji.

Pada awal tahun 2019 ditargetkan 10 desa yang dalam pelaksanaan pelaporan keuangannya dapat dilaksanakan dengan tertib dan baik, selama tahun 2019 berjalan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk desa yang menyelesaikan pelaporan keuangannya yang tertib dan baik sebanyak 3 (tiga) desa yaitu : desa Panji Kidul, Desa Tenggir dan Desa Kayuputih, sehingga capaiannya adalah 30%
2. Hingga akhir bulan Desember 2019 ditambah 7 (tujuh) desa lagi yang menyelesaikan laporan keuangannya, sehingga secara keseluruhan capaiannya adalah 100% dari target awal tahun 2019.

Dapat disimpulkan pada akhir tahun 2019 dari pelaksanaan pelaporan keuangan yang tertib dan baik adalah sebesar 100% , sehingga untuk capaian kinerja indikator ini adalah 100% ( berhasil )

**1.1.3 Indikator Kinerja III : Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD**

Usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019		%
		Target	Realisasi	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	100%	100%	100 %

Menggambarkan rekapitulasi usulan kegiatan dari Desa / kelurahan yang direncanakan untuk tahun berikutnya yang disampaikan melalui Musrenbang kecamatan, terdapat dari 30 usulan yang ditargetkan , dan terealisasi yang masuk pada RKPD sebanyak 30 usulan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 % ( sangat berhasil )



#### 1.1.4 Indikator Kinerja IV : Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah

Usulan Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Panji pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019		%
		Target	Realisasi	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	90 (A)	82,30 (A)	82,30 %

Menggambarkan Capaian nilai Sakip Perangkat Daerah dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan, yaitu dari Nilai BB menjadi Nilai A (80,23) pada Tahun 2019, walaupun belum memenuhi target yang ingin dicapai dengan nilai Sakip A (90), sehingga capaian nilai Sakip sebesar 82,30 % ( berhasil )

#### 1.2 Analisis Capaian Kinerja

**Tabel 1.2.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi		
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panji	A(90)	B (72)	B (80,74)	B(91.03)
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan yang tertib dan baik	100%	50%	70%	100%
		Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (90)	C	BB	(A) 82,30%

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dengan tabel berikut :

**Tabel 1.2.2**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panji	A (90)	91,03	91,03%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan yang tertib dan baik	100%	100 %	100%
	Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	100%	100 %	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (90)	82,30 (A)	82,30%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional dengan tabel berikut :

**Tabel 1.2.3**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Daerah Th. 2017	Realisasi Daerah Th. 2018	Realisasi Daerah Th. 2019	Realisasi Nasional Th. 2016	Realisasi Nasional Th. 2016	Realisasi Nasional Th. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panji	B (72)	B (80,74)	A (91,03)	N/A	N/A	N/A
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan yang tertib dan baik	50%	70%	100%	N/A	N/A	N/A
	Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	C	BB	A (80,23)	N/A	N/A	N/A
---	--------------------------------------	---	----	-----------	-----	-----	-----

### 1.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Dalam analisis capaian kinerja anggaran, akan dicantumkan Cost per Outcome, yaitu :

#### a. Alokasi Per sasaran Pembangunan :

**Tabel 1.3.1**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panji	20.000.000	100%
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan yang tertib dan baik	35.000.000	92,23%
		Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	17.000.000	100%

#### b. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran :

**Tabel 1.3.2**

No	Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai survey IKM Kecamatan Panji	A (90)	B(91,03)	91,03	20.000.000	20.000.000	100,00
	Program : Penataan Daerah Otonomi baru							
2	Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan paelaporan keuangan yang tertib dan baik	100%	100%	100	35.000.000	32.314.000	92,23
	Program : Pembinaan Dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							
	Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase usulan kegiatan masyarakat	100%	100%	100	17.000.000	17.000.000	100,00

	<b>Program :</b> Pembinaan Dan Fasilitasi Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :**

**Tabel 1.3.3**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Capaian Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=(4-5)</b>
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panji	91,03	100,00	8,97%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan yang tertib dan baik	100	92,23	7,77%
		Prosentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	100	100,00	0,00%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Seperti yang telah diuraikan diatas dari 2 (dua) sasaran yang harus di capai pada tahun 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 semua sasaran telah dicapai dengan baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan karena adanya kerjasama yang baik antara semua unsur baik dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Sedangkan kendala utama yang di hadapi kantor Kecamatan Panji, secara umum adalah sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo masih kurang memenuhi serta yang berhubungan dengan peralatan perkantoran yang masih belum lengkap disamping beberapa referensi-referensi yang diperlukan terkait dengan peraturan pemerintah di bidang Perijinan, Legalisasi, Rekomendasi dan pelimpahan kewenangan kepada kantor Kecamatan.

#### **B. Saran**

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten agar memberikan tambahan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana kantor guna menunjang kelancaran tugas serta disamping juga pengadaan terhadap beberapa referensi terkait dengan diterbitkannya peraturan pemerintah di bidang tersebut di atas kepada Kantor Kecamatan Panji.

Demikian laporan yang dapat di sampaikan, semoga laporan ini akan lebih meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Panji pada tahun masa - masa yang akan datang.

Panji, 10 Januari 2020

**CAMAT PANJI**

**ANNA KUSUMA, SH, M.Si**

Pembina

NIP. 19831221 200604 2 009



# LAMPIRAN